

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PINJAMAN  
ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY  
(*FINTECH*)**

**TESIS**

**Oleh :**

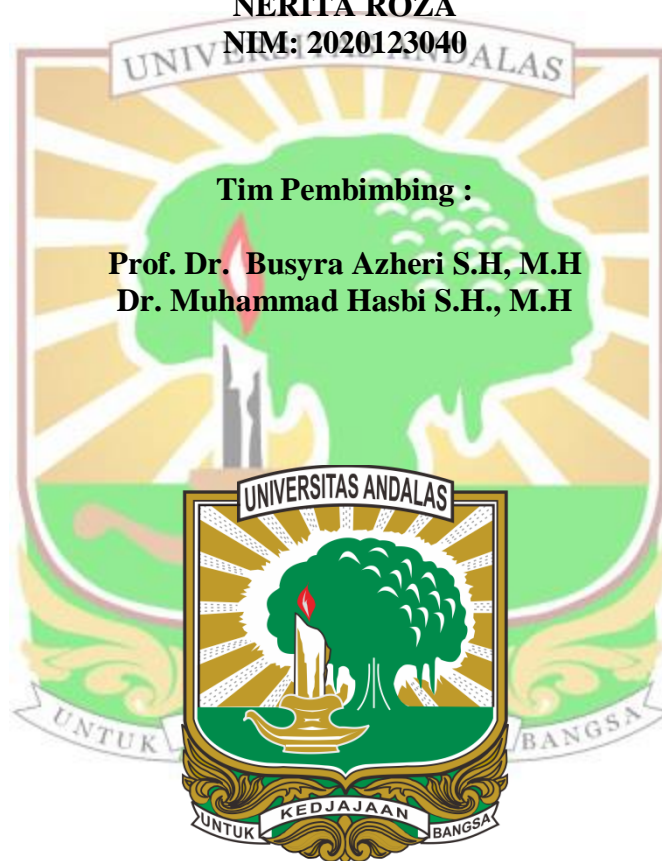
**NERITA ROZA**

**NIM: 2020123040**

**Tim Pembimbing :**

**Prof. Dr. Busyra Azheri S.H, M.H**

**Dr. Muhammad Hasbi S.H., M.H**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2024**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY( FINTECH )

Nerita Roza, 2020123040, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas 2024, 130 halaman

## ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau ilegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, Dengan kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara, dengan bermacam masalah tersebut diatas maka penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tersebut diatas dengan judul tesis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology(Fintech), dengan rumusan masalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah pengguna pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech)? Bagaimanakah kepastian hukum perjanjian pinjaman online terhadap kegiatan usaha Financial Technology (Fintech)?. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normativ. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian Data yang dikumpulkan meliputi data primer data sekunder dari hasil penelitian baik itu, data primer, data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

Kata kunci : *Fintech, Perlindungan Hukum Pinjaman Online*

# **LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN ONLINE LOAN AGREEMENTS BASED ON FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)**

Nerita Roza, 2020123040, Master of Notary Study Program Postgraduate Faculty of Law,  
Andalas University 2024, 130 pages

## **ABSTRACT**

The rapid growth of information technology-based money lending and borrowing service providers has not been balanced with adequate education for the public, resulting in various effects/risks arising from the large number of types of online loans and the large number of unregistered or illegal providing companies found as well as the potential for users' personal data to be leaked, which can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts to guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of this UUPK is to guarantee the legal certainty of consumer protection with the fulfillment of consumer rights. With the condition of consumers being weak and having many disadvantages, it requires increased efforts to protect, so that consumer rights can be upheld. However, on the contrary, it should be noted that in providing protection to consumers, it must not actually kill the businesses of business actors, because the existence of business actors is something essential in the country's economy. With the various problems mentioned above, the author considers it necessary to discuss the main problems mentioned above with the title of the thesis. Legal Protection For Customers In Online Loan Agreements Based On Financial Technology (Fintech), with the problem formulation what is the legal protection for customers using online loans based on Financial Technology (Fintech)? What is the legal certainty of online loan agreements regarding Financial Technology (Fintech) business activities? The method used in this writing is a normative juridical approach. Data collection through literature study with literature that is related to the research object. Data collected includes primary data, secondary data from research results, both primary data and secondary data, which will be analyzed qualitatively. The results of this research show that legal protection for consumers by implementing a fintech-based company monitoring system is closely related to legal issues regarding consumer protection which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys to ensuring that consumers' rights can be protected comes from the extent of regulations related to supervision and monitoring systems carried out by the government (in this case the OJK) regarding the fintech company itself. The step that the government must take is that its implementation must be guided by the Financial Services Authority Regulations. No. 77 /POJK.01/2016 Concerning Information Technology Based Money Lending and Borrowing Services,

Keywords: Fintech, Legal Protection of Online Loans